

## **PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN MELALUI PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**ROSITA ADIANI; SYAIFUDIN; DAN SUYUTI**

Dosen Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta

Email: rosita-adiani@unj.ac.id; syaifudin@unj.ac.id;

yuti@unj.ac.id

### **ABSTRAK**

Berdasarkan penelitian di lapangan, dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi membuat berbagai program kegiatan beserta jadwalnya. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan sehingga terbentuknya kemandirian anak jalanan seperti: (a) Semangat kemanusiaan; (b) kemampuan dalam memecahkan masalah; (c) adanya kerjasama dan koordinasi; (d) kemampuan kreatif dan inovatif. Namun fakta dilapangan menunjukkan masih ada kendala dalam pelaksanaannya sehingga terkadang mengganggu kinerja pengurus seperti: (a) prasangka negatif dari masyarakat mengenai anak jalanan (b) rasa tidak percaya diri.

**Kata kunci:** *pemberdayaan, anak jalanan, dan rumah singgah bina anak pertivi*

### **PENDAHULUAN**

Hakikatnya anak adalah masa depan bagi keluarganya, dan juga bangsanya. Oleh karena itulah anak berhak mendapat perlindungan dan bimbingan dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebaik mungkin. Semua itu dilakukan agar mereka dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mereka berhak untuk mendapat perlindungan sehingga dapat hidup aman, damai dan tenteram dalam keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat.

Selain itu juga, anak berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi atau dipekerjakan (Suyanto, 2001). Pernyataan tersebut sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu: “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi (Nachrowi dan Muhidin, 1997, h. 28)”. Pernyataan mengenai hak anak juga dapat kita lihat dalam isi Plan International yang dikutip oleh Suharto, bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan pengasuhan, di mana mereka dapat merealisasikan potensi mereka sepenuhnya (2011, h. 231).

Namun sebagai aset bangsa, justru tidak semua anak memperoleh haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana hak yang mereka miliki. Kondisi tersebut setidaknya terjadi dan dialami oleh para anak jalanan. Dimana hak mereka sebagai anak justru tidak dapat mereka nikmati secara layak, baik hak untuk memperoleh pengakuan maupun hak sebagai manusia yang memiliki harga diri dan martabat sebagai manusia.. Dimana anak jalanan ini digambarkan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat stratifikasi sosial rendah atau merupakan golongan bawah dengan status sosial serta posisi yang tidak jelas. Maka untuk itu permasalahan anak jalanan merupakan bagian dari fenomena nyata kehidupan yang menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Bahkan ironisnya, anak jalanan di Indonesia justru terus bertambah jumlahnya setiap tahun dan dengan berbagai macam masalah yang tercipta di jalanan. Berdasarkan data Kementerian Sosial pada tahun 2013, setidaknya pada tahun 2013 ada 230.000 anak jalanan, yang dimana sebelumnya pada tahun 2012 sekitar 200.000 anak jalanan. Selain itu juga di tahun 2013 ada 4,5 juta anak telantar, dan ada 10,3 juta anak berpotensi menjadi anak jalanan (“*Potret*”, 2013).

Pilihan menjadi anak jalanan ini disebabkan karena tidak ada pilihan yang lebih baik yang dapat mereka jadikan alternatif untuk tidak menjadi anak jalanan. Dimana kemudian jalanan

dianggap menjadi tempat untuk bertahan hidup dan bekerja guna membantu diri mereka atau orang tua untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarga. Mereka bertahan hidup sebagai pengamen, pedagang asongan, kernet bus, peminta – minta, pemulung, bahkan tidak sedikit yang menjadi pelaku kriminal (“*Berdayakan*”, 2012, h. 1). Mereka pun pada umumnya berada di lokasi-lokasi keramaian tengah kota, seperti terminal, pasar, tempat hiburan, persimpangan lampu merah (Misran, 2011, h. 2).

Para anak yang menjadi anak jalanan pada umumnya disebabkan oleh faktor keluarga (Misran, 2011). Disini terlihat orang tua mengalami disfungsi. Disfungsi orang tua merupakan unit pemicu terjadinya masalah sosial bagi anak karena orang tua gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan sosialnya (Soekanto, 1990, h. 370). Adanya disfungsi orangtua ini biasanya terjadi pada masyarakat atau keluarga yang kurang mampu, misalnya karena suami/ayah sebagai kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar keluarganya, maupun peran istri/ibu yang tidak dapat memberikan pendidikan bagi anak – anaknya atau mengurus anak – anaknya dengan baik. Selain itu permasalahan keluarga juga dapat muncul dari keadaan keluarga yang disharmonis atau *broken home*. Dalam hal ini, anak terkadang kurang mendapatkan perhatian, tekanan batin terhadap keluarga dan adanya keretakan di dalam keluarga, yang dapat menimbulkan pemberontakan di dalam diri setiap anak dan berusaha mencari jalan keluar dari setiap masalah keluarga yang ia hadapi. Lalu masalah lainnya seorang anak yang merasa bosan dan tersiksa di rumah karena setiap harinya harus menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar tanpa memperhatikan nasib mereka, pada akhirnya memilih untuk turun ke jalan karena menganggap dirinya akan memiliki kebebasan dan memiliki banyak teman yang bisa menampung keluh kesahnya. Keadaan inilah yang terkadang sering tanpa disadari dapat mempengaruhi pembentukan emosional dan kepribadian anak, serta membuat kondisi mental dan psikis anak mengalami kelabilan, seperti mudah tersinggung, temperamental, kurang percaya diri dan lain sebagainya (Sjarkawi, 2008). Sehingga kondisi tersebut membuat anak mudah sekali untuk terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Safaria (2005, h. 35), bahwa anak tidak bisa lepas dari lingkungan sosialnya karena mereka belajar dan berkembang dari dan di dalamnya. Untuk itulah teman dan lingkungan sosial yang mendukung menjadi penentu kematangan anak ke depannya.

Selain faktor keluarga (orang tua), faktor lainnya yang dapat memberikan pengaruh seorang anak menjadi anak jalanan adalah kondisi lingkungannya (Sjarkawi, 2008). Dimana kondisi di daerah-daerah kumuh yang tidak dapat mendukung tumbuh kembang anak secara wajar, seperti tidak adanya tempat untuk anak bermain dan menikmati masa kanak-kanaknya, perumahan yang sempit dan tidak sesuai untuk tempat tinggal manusia serta tidak tersedianya fasilitas dasar pendidikan dan kebutuhan sosial mereka. Oleh karena itu menurut Soetarso (dalam Huraerah, 2007) masalah anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal seperti: *Pertama*, berlangsungnya kemiskinan struktural dalam masyarakat; *Kedua*, semakin terbatasnya tempat bermain bagi anak karena pembangunan yang semakin tidak mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan anak; dan *Ketiga*, semakin meningkatnya gejala ekonomi upah dan terbukanya peluang bagi anak untuk mencari uang dari jalanan.

Segala bentuk tantangan kehidupan yang di hadapi oleh anak jalanan ini pada umumnya berbeda dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, anak jalanan ini sering hidup dan berkembang di bawah tekanan dan stigma atau cap sebagai pengganggu ketertiban. Selain itu juga anak jalanan hidup dalam keadaan yang sangat kurang akan kasih sayang. Proses untuk pengembangan pribadi, seperti melalui pendidikan sangat minim mereka dapatkan. Anak jalanan juga dapat dikategorikan ke dalam anak yang tidak mampu. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 6 UU nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yaitu: "Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar". Kenyataan inilah yang kemudian membuat semakin banyaknya jumlah anak jalanan di kota – kota besar, dalam hal ini khususnya kota Jakarta. Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, bahwa jumlah anak jalanan di Jakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya tercatat

ada 7.300 anak jalanan di Jakarta. Jumlah itu meningkat sekitar 10 persen dari tahun lalu (“7.300”, 2013).

Melihat jumlah anak jalanan yang setiap tahun terus meningkat, maka perlu adanya kepedulian dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, LSM, perusahaan, maupun sivitas akademika untuk dapat menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan tersebut. Dimana bentuk intervensi sosial yang dilakukan untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah anak jalanan ini tidak hanya semata dengan memberikan bantuan modal kepada orang tua anak jalanan saja, melainkan juga ikut berperan dalam mendukung pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Anita (1996), bahwa dalam penyelesaian masalah anak jalanan tidak hanya bertumpu pada pemberian modal dan peningkatan ketrampilan kerja orang tua anak jalanan, akan tetapi perlu juga memikirkan kondisi anak jalanan tersebut agar ia dapat menjalani hidup lebih baik lagi. Oleh karena itu, salah satu usaha yang umumnya dilakukan untuk memberikan ketrampilan dan pendidikan bagi para anak jalanan ini yaitu dengan pemberdayaan ber basis komunitas yang berada pada rumah singgah.

Keberadaan rumah singgah merupakan salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial berupa program pelayanan sosial yang diberikan bagi kelompok miskin atau rentan seperti anak jalanan. Adapun sifat rumah singgah itu sendiri awalnya bukan merupakan tempat pendidikan bagi para anak jalanan, melainkan merupakan sarana untuk tempat mereka berkumpul saja. Tujuannya, di samping anak-anak jalanan ini lebih bisa terkontrol, dan rumah singgah juga dapat digunakan oleh para pengurus untuk menginternalisasikan pesan-pesan yang positif mengenai kehidupan (Runtiko, 2009, h. 37). Salah satu rumah singgah yang melakukan kegiatan pemberdayaan anak jalanan yaitu Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi . Dimana rumah singgah ini berperan aktif dalam mendukung pola pembinaan dan pemberdayaan bagi anak jalanan yang ada di wilayah Jakarta. Dimana Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi ini menjalankan pemberdayaan sosial untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan yang berbasis pada komunitas.

Adapun keberadaan rumah singgah ini memiliki dasar keyakinan bahwa setiap anak berhak memiliki akses untuk

tumbuh dan menjadi manusia yang utuh dengan segala potensi dan kelemahan yang dimiliki. Dimana Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi inipun bukan hanya sekedar rumah singgah yang ditujukan untuk menyelamatkan dan melindungi anak dari segala hal yang bisa mengancam keberlangsungan hidup mereka. Tetapi di rumah singgah inilah anak-anak yang terpinggirkan haknya itu bisa hidup bersama dan membangun harapan hidup yang lebih baik lagi melalui proses belajar, pembinaan dan pemberdayaan yang dimiliki oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka disinilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana rumah singgah berperan sebagai eskalasi kesejahteraan sosial bagi anak jalanan. Salah satu eskalasi kesejahteraan sosial tersebut yakni terkonstruksinya kemandirian sosial anak jalanan dalam menjalankan masa depannya. Adapun mengapa peneliti memfokuskan pada aspek eskalasi kesejahteraan sosial, karena anak jalanan yang sudah mengalami eksklusi sosial ini haruslah dibuat berdaya dalam menjalani hidupnya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan permasalahan yang akan peneliti kaji yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi bagi para anak jalanan?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pemberdayaan sosial kepada anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi?

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti ingin mengetahui secara lebih detail dan mendalam tentang pemberdayaan sosial di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi dalam mewujudkan eskalasi kesejahteraan sosial bagi anak jalanan. Oleh karena itulah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kasus, yakni salah satu bentuk penelitian kualitatif

yang melakukan eksplorasi terhadap satu atau lebih kasus yang terkait dalam satu sistem sosial tertentu (Creswell, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi**

Melihat jumlah anak jalanan yang setiap tahun terus meningkat, maka perlu adanya kepedulian dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, LSM, perusahaan, maupun sivitas akademika untuk dapat menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan tersebut. Dimana bentuk intervensi sosial yang dilakukan untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah anak jalanan ini tidak hanya semata dengan memberikan bantuan modal kepada orang tua anak jalanan saja, melainkan juga ikut berperan dalam mendukung pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan tersebut. Dimana dalam kegiatan ini memberikan hak anak berupa kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada pasal 1 disebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh karena itu, salah satu usaha yang umumnya dilakukan untuk memberikan keterampilan dan pendidikan bagi para anak jalanan ini yaitu dengan pemberdayaan berbasis komunitas yang berada pada rumah singgah.

Keberadaan rumah singgah merupakan salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial berupa program pelayanan sosial yang diberikan bagi kelompok miskin atau rentan seperti anak jalanan. Adapun sifat rumah singgah itu sendiri awalnya bukan merupakan tempat pendidikan bagi para anak jalanan, melainkan merupakan sarana untuk tempat mereka berkumpul saja. Rumah singgah merupakan wahana perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Johnson dan Schwartz (1991, h. 167) bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

ditujukan untuk membantu memperbaiki kondisi anak dan keluarga untuk memperkuat kembali, melengkapi, atau mengganti fungsi orangtua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan merubah institusi-institusi sosial yang ada atau membentuk institusi baru.

Rumah singgah melaksanakan resosialisasi sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat secara informal kepada anak dan merupakan tahap awal bagi seorang anak untuk memperoleh pelayanan selanjutnya. Tujuan umum rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tujuan khusus rumah singgah yaitu, (Siahaan, 2003, h. 52):

- a. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan.
- c. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya, sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu rumah singgah yang melakukan kegiatan pemberdayaan anak jalanan yaitu Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi . Dimana rumah singgah ini berperan aktif dalam mendukung pola pembinaan dan pemberdayaan bagi anak jalanan yang ada di wilayah Jakarta. Dimana Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi ini menjalankan pemberdayaan sosial untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan yang berbasis pada komunitas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi para anak jalanan. Dimana pelaku pemberdayaan bisa siapa saja. Hal ini seperti yang dikemukakan Midgley (2005), diantaranya: (a) Pembangunan sosial melalui individu (*Social Development by Individuals*); (b) Pembangunan Sosial melalui Komunitas (*Social Development by Communities*); dan (c) Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (*Social Development by Governments*). Berdasarkan pernyataan dari Midgley, maka pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi

merupakan bentuk pembangunan sosial melalui komunitas. Sementara menurut Suharto (2011, h. 106) pembangunan kesejahteraan sosial adalah serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup manusia. Berdasarkan pernyataan Suharto (2011, h. 106), dengan demikian bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terencana dan teorganisir, dan melalui Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi inilah kegiatan pemberdayaan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Sementara itu berdasarkan hasil temuan dilapangan, maka diketahui bahwa apa yang dijalankan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi kepada para anak jalanan merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan sosial. Dimana proses penerimaan anak jalanan dimulai dengan mengamati keberadaan anak jalanan di lokasi tertentu. Adapun usia anak jalanan yang di terima, yaitu yang berusia 5 sampai 20 tahun dan memiliki keluarga. Dari rentang usia tersebut, kemudian dibagi kegiatan dan orientasi kegiatannya. Bagi anak yang berusia 5 sampai 10 tahun orientasi kegiatan agar anak dapat melanjutkan sekolah formalnya, dan bagi anak yang berusia 11 sampai 20 tahun orientasi kegiatan agar anak dapat melanjutkan sekolah formalnya dan dapat bekerja yang layak. Sedangkan pendekatan pembelajarannya, yaitu menggunakan pendekatan Reflektif dan Eksploratif. Kemudian untuk tercapainya pendekatan tersebut, didukung dengan metode pembelajaran Partisipatif, disiplin kreatif, dan repetisi. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan selama satu tahun, dan setiap 3 bulan dilakukan ujian. Selama proses pemberdayaan ini, anak dilihat perkembangannya. Jika ia sudah dianggap mandiri, maka ia dinyatakan lulus dan dipersilakan untuk melanjutkan kehidupannya yang baru. Dimana kriteria kemandirian anak jalanan dilihat dari apakah ia sudah memiliki rasa percaya diri dan percaya dengan kemampuan diri sendiri, serta ia sudah dapat kerja yang layak atau belum, dan sudah atau belum melanjutkan sekolah formalnya.

Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaannya Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi membuat berbagai program kegiatan beserta jadwalnya. Bentuk program yang diselenggarakan Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi ini dijadikan sebagai bagian dari keseluruhan proses pengembangan pengetahuan (karya), kreativitas/skill (cipta), kehendak (karsa) dan afeksi (rasa). Hal ini sesuai dengan konteks bahwa anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat.

Program-program itu meliputi kelompok bermain dan kelompok belajar keterampilan dasar yang ditujukan bagi para peserta didik untuk lebih berdaya dalam berbagai proses pembangunan dan untuk mencapai terpenuhinya hak-hak anak, yang tentunya tidak mereka dapatkan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini yang sebagaimana diungkapkan oleh Payne (dalam Ivancevich, 2006, h. 85) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan. Sedangkan menurut Conger dan Kanungo (dalam Ivancevich, 2006, h. 85) pemberdayaan merupakan proses meningkatkan perasaan mampu pada anggota organisasi dengan mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakberdayaan dan menyingkirkan kondisi-kondisi tersebut melalui praktik organisasional formal dan teknik informal yang menyediakan informasi dan berbagai kegiatan yang menciptakan keberdayaan.

Dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi kepada anak jalanan ini setidaknya mewujudkan kesejahteraan sosial kepada para

anak jalanan. Di mana menurut Segal dan Brzuzy (dalam Suud, 2006, h.5), kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Di mana kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Sedangkan menurut Suharto (2012, h. 34) “kesejahteraan sosial berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial”. Sementara Midgley (2005) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai suatu yang tercipta atas kompromi tiga elemen, yaitu: “*Pertama*, sejauhmana masalah-masalah sosial ini diatur; *Kedua*, sejauhmana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, dan; *Ketiga*, sejauhmana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan”. Apa yang dilakukan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi dalam kegiatan pemberdayaan kepada anak jalanan, setidaknya merupakan bagian dari usaha kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan konteks bahwa kesejahteraan anak merupakan bidang khusus dalam profesi kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan masalah – masalah kesejahteraan anak, mengenai kurangnya serta ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai akibat kemiskinan dan adanya interaksi yang kurang memadai didalam keluarga, maka perlindungan anak sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan anak.

Adapun orientasi kesejahteraan sosial dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan yaitu membentuk kemandirian para anak jalanan. Di mana Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi dengan dinamika hidup harian komunitasnya berupaya untuk melatih sensitifitas anak-anak terhadap lingkungannya. Hal ini tidak hanya menyangkut cara mereka berinteraksi, mengolah sikap solidaritas antar anggota di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi serta selalu melakukan mediasi untuk tiap permasalahan yang dihadapi atau bahkan belajar tentang manajemen kebutuhan harian di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi yang mencakup perawatan rumah, pengadaan sarana dan pengelolaan menu masakan harian saja, melainkan juga dengan meningkatkan rasa saling memiliki terhadap sarana dan fasilitas yang ada. Meskipun ada penanggungjawab dari masing-masing bidang,

namun pada dasarnya setiap anak atau anggota Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi memiliki tanggung jawab yang sama dalam perawatan dan penyelenggaraan dinamika rumah tangga harian tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Johnson dan Schwartz (1991, h. 167)), bahwa bagian dari kegiatan dan program masyarakat berupa perhatian terhadap anak-anak sampai mereka mampu untuk dapat hidup mandiri.

Upaya pembentukan kepribadian ini juga selalu dijadikan salah satu acuan yang dapat mengantarkan mereka menuju kemandirian dan kesuksesan dalam hidupnya. Dimana dalam pembentukan kepribadian ini tidak hanya terbatas sebagai reaksi mental emosional diri sendiri terhadap orang lain (sosio-emosional), tetapi juga reaksi terhadap objek di luar manusia, seperti suasana, alam atau benda tertentu. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian ini memperkuat kemampuan memberikan apresiasi pada hal-hal yang tidak hanya dinilai indah atau bagus, melainkan juga sesuatu yang dinilai buruk atau jelek bagi perkembangan kepribadian para peserta didik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Walgito (2004), bahwa perkembangan sifat mandiri adalah satu hal penting dalam perkembangan seorang manusia yang dipengaruhi oleh pembentukan kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini selanjutnya merupakan dasar bagi perkembangan sikap yang lain seperti halnya sikap kreatif dan tanggung jawab.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi dalam rangka pembentukan kepribadian dan kemandirian telah membuat para peserta didik yang biasa tinggal di jalanan dengan berbagai sikap buruk, kemudian berkehendak untuk melakukan tindakan yang bernilai positif, kesadaran melakukan hal-hal yang bermakna bagi kepentingan bersama, lebih mandiri dalam melakukan kegiatan apapun dan lebih bisa mengendalikan emosional diri ke tingkatan yang paling rendah. Kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian serta membuat para peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, dilakukan melalui tindakan yang didasarkan atas pemahaman

subjek tentang nilai yang akan dicapai atau didapatkan atas kesepakatan bersama dan kesadaran masing-masing individu untuk mewujudkannya dalam berbagai bentuk proses dan pelaksanaannya.

Apa yang diharapkan dari kegiatan pemberdayaan di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi agar anak jalanan ini dapat mandiri secara sosial, seperti apa yang diungkapkan oleh Lerner bahwa kemandirian secara sosial mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung kepada orang lain, tidak terpengaruh lingkungan dan bebas mengatur kebutuhan sendiri. Sementara Watson dan Lindgren (dalam Papalia dan Olds, 1995) menyatakan bahwa kemandirian secara sosial ialah kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, gigih dalam usaha, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa bantuan orang lain.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan, maka analisis dari faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1. Semangat kemanusiaan**

Semangat kemanusiaan sangat diperlukan bagi para pelaku pemberdayaan. Di mana menurut Tjokrowinoto (2001) bentuk kemampuan yang dianggap sangat relevan dengan kualitas pelaku pemberdayaan, yakni: (1) kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada, (2) kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang dianggap prioritas dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, (3) kemampuan mengidentifikasi subjek-subjek yang mempunyai potensi memberikan input dan sumber bagi proses pembangunan, (4) kemampuan menjual inovasi dan memperluas wilayah penerimaan program-program yang diperuntukkan bagi kaum miskin; dan (5) kemampuan memainkan peranan sebagai fasilitator atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh

berkembang dengan kekuatan sendiri. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengalami ketidakmaksimalan apabila tidak ada pondasi semangat kemanusiaan yang dimiliki oleh para pelaku pemberdayaan.

Sementara dalam pandangan Owin (2004) kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat efektif atau tidak ditentukan dengan faktor-faktor yang bersifat prinsipil dalam kegiatan pemberdayaan. Salah satunya yaitu para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur *stakeholders*, harus berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang adil). Dari sekian banyak arti dan bentuk perilaku adil, setidaknya dua hal diantaranya akan menjadi sangat penting yakni: Keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Kondisi berlakunya keadilan distribusi dan keadilan prosedural tidak lepas atas dasar semangat kemanusiaan untuk mencurahkan diri dalam kegiatan sosial. Tanpa modal dasar tersebut, maka tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku pemberdayaan.

2. Kemampuan Dalam Memecahkan Masalah (*problem solving*)

Menurut Owin, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat efektif atau tidak ditentukan dengan faktor-faktor yang bersifat prinsipil dalam kegiatan pemberdayaan. Salah satunya yaitu para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur *stakeholders* memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*). Dimana kemampuan melakukan *problem solving*, menumbuhkan dan memasarkan inovasi, asistensi, fasilitasi, promosi, dan *social marketing*. Memecahkan masalah (*problem solving*) adalah proses bagaimana semua pihak menerima jalan keluar yang ditawarkan. Pemecahan masalah, bisa jadi dari si pemilik masalah itu sendiri. Dalam hal ini terdapat seni bagaimana proses dialog yang baik berlangsung ketika proses mencari jawaban dari sebuah masalah. Tenaga pemberdaya harus terampil dan kreatif mencari inovasi (ide dan pemikiran baru atau

terobosan baru); juga terampil melakukan asistensi dan fasilitasi (bimbingan dan dampingan); demikian juga dalam hal promosi dan *sosial marketing* (Owin, 2004).

3. Adanya kerjasama dan koordinasi

Kerjasama dan koordinasi sangatlah penting dalam keberlanjutan sebuah kegiatan pemberdayaan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Owin, bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat efektif atau tidak ditentukan dengan faktor-faktor yang bersifat prinsipil dalam kegiatan pemberdayaan. Salah satunya yaitu kerjasama dan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan. Dimana kerjasama dan koordinasi seluruh unsur *stakeholders* didasarkan pada sistem kemitraan. Kendatipun ada struktur pengelolaan program dengan berbagai atribut jabatannya, namun dalam proses perjalanannya harus berlangsung secara kemitraan. Mengejar misi dan mencapai tujuan program adalah tugas bersama. Apabila ada persoalan, semestinya menjadi tanggungjawab bersama untuk mengatasinya, dan tidak dibenarkan apabila pihak pimpinan atau pihak tertentu mengatakan “itu adalah tugasmu dan kamulah yang harus bertanggungjawab” (Owin, 2004).

4. Kemampuan kreatif dan inovatif

Menurut Owin, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat efektif atau tidak ditentukan dengan faktor-faktor yang bersifat prinsipil dalam kegiatan pemberdayaan. Salah satunya yaitu menurut Owin (2004) bahwa tenaga pemberdaya harus terampil dan kreatif mencari inovasi (ide dan pemikiran baru atau terobosan baru); juga terampil melakukan asistensi dan fasilitasi (bimbingan dan dampingan); demikian juga dalam hal promosi dan *sosial marketing*.

## **b. Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dan kemudian informasi-informasi

tersebut peneliti kategorikan. Maka faktor penghambat tidak maksimalnya atau terkendalanya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi di lapangan yaitu sebagai berikut,

1. Prasangka negatif dari masyarakat mengenai anak jalanan.

Terkait dengan prasangka negatif dari masyarakat mengenai anak jalanan yang berada di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi menjadi sebuah hambatan eksternal tersendiri dalam proses menjalankan kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itulah menurut Adi (2013, h. 190-262) ada tiga kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu:

- (1) Kendala yang bersumber dari eksternal komunitas, seperti:
  - a. Penolakan terhadap “orang Luar”
  - b. Program lembaga eksternal komunitas yang tidak memberdayakan.
  - c. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak memberdayakan.

Berdasarkan pernyataan Adi (2013, h. 190-262) di atas, maka bentuk prasangka negatif dari masyarakat mengenai anak jalanan yang berada di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi merupakan bagian dari kendala yang bersumber dari eksternal komunitas berupa penolakan terhadap “orang luar”, dan “orang luar” disini adalah anak jalanan. Kenapa anak jalanan dianggap sebagai “orang luar”, karena adanya stigma negatif terhadap anak jalanan. Di mana sebagian besar masyarakat menganggap anak jalanan diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, sampah masyarakat yang harus diasingkan.

2. Rasa tidak percaya diri

Rasa percaya diri merupakan salah satu hal penting yang harus selalu diasah kemampuannya supaya terus meningkat dan berkembang dengan seiring waktu. Tanpa adanya rasa percaya diri, maka seseorang akan terlihat lebih tertutup (*introvert*), terlihat gugup, tidak

terstruktur serta kerap kali tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengekspresikan diri dengan bebas lewat gerakan maupun tutur kata. Terlebih lagi jika harus tampil didepan umum dan disaksikan oleh banyak orang, pasti tidak akan berujung pada hasil yang baik. Dengan percaya diri ini, setidaknya akan mendukung proses terbentuknya kemandirian dalam sebuah kegiatan pemberdayaan. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi, terkadang rasa tidak percaya diri muncul dalam diri para anak jalanan. Sehingga hal ini dinilai oleh pengurus rumah singgah sebagai suatu hambatan yang harus diselesaikan. Sebab jika rasa tidak percaya diri selalu ada dalam diri anak jalanan, maka sikap kemandirian tidak akan muncul dalam diri anak jalanan tersebut.

Terkait dengan rasa tidak percaya diri ini menjadi sebuah kendala (masalah) tersendiri dalam proses menjalankan kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itulah menurut Adi (2013, h. 190-262) ada tiga kendala dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu:

- (1) Kendala internal komunitas yang berasal dari internal komunitas sasaran, terdiri dari:
  - a. Faktor predisposisi dari komunitas sasaran, seperti (1) ingatan masa lalu dan persepsi yang telah terseleksi; (2) superego; (3) rasa tidak percaya diri.
  - b. Kebiasaan dari komunitas sasaran.
  - c. Ketergantungan komunitas sasaran terhadap orang lain.
  - d. Pengalaman keberhasilan terdahulu.
  - e. Pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu.

Berdasarkan pernyataan Adi (2013, h. 190-262) di atas, maka rasa tidak percaya diri yang berasal dari para anak jalanan yang berada di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi merupakan bagian dari kendala internal yang berasal dari internal komunitas sasaran yang bersumber dari faktor predisposisi dari komunitas sasaran. Munculnya rasa tidak percaya diri pada anak jalanan tidak

lepas karena para anak jalanan ini menganggap dirinya adalah masyarakat kelas dua seperti yang distigmakan kepada mereka serta masa lalu yang membuat mereka mengalami ketidakpercayaan diri. Dimana mereka dianggap sebagai kelompok anak-anak yang mempunyai karakteristik dan gaya hidup yang serupa dan kebanyakan berasal dari keluarga miskin yang orang tuanya tidak memiliki pekerjaan, kehidupan perkawinannya tidak stabil, peminum alkohol dan lain-lain. Dari stigma dan masa lalu keluarga itulah yang terkadang membuat para anak jalanan merasa tidak percaya diri untuk menata masa depannya ke arah yang lebih baik lagi.

## **PENUTUP**

Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi hadir sebagai salah satu rumah singgah yang ikut berperan aktif dalam mendukung pemberdayaan anak jalanan. Atas dasar keyakinan bahwa setiap anak berhak memiliki akses untuk tumbuh dan menjadi manusia yang utuh dengan pengembangan potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu melalui berbagai program pemberdayaan yang ada di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi, seperti kegiatan Sekolah Otonom (Sekosa), kegiatan pelatihan kesenian, dan kegiatan pelatihan kewirausahaan, para relawan social yang juga pengurus sekaligus fasilitator berusaha melakukan pemberdayaan anak jalanan untuk meningkatkan kemandirian mereka sebagai modal untuk mencapai tingkat kesejahteraan social mereka yang layak dan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penelitian di lapangan, dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi membuat berbagai program kegiatan beserta jadwalnya. Dalam proses penerimaan anak jalanan dimulai dengan mengamati keberadaan anak jalanan di lokasi tertentu, seperti di perempatan lampu merah dan terminal. Adapun usia anak jalanan yang menjadi penerima manfaat kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi, yaitu yang berusia 5

sampai 20 tahun dan memiliki keluarga. Dari rentang usia tersebut, kemudian dibagi kegiatan dan orientasi kegiatannya. Bagi anak yang berusia 5 sampai 10 tahun orientasi kegiatan agar anak dapat melanjutkan sekolah formalnya, dan bagi anak yang berusia 11 sampai 20 tahun orientasi kegiatan agar anak dapat melanjutkan sekolah formalnya dan dapat bekerja yang layak. Sedangkan pendekatan pembelajaran dalam kegiatan pemberdayaan sosial disini, yaitu menggunakan pendekatan reflektif dan eksploratif. Kemudian untuk tercapainya pendekatan tersebut, didukung dengan metode pembelajaran partisipatif, disiplin kreatif, dan repetisi. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan selama satu tahun, dan setiap 3 bulan dilakukan ujian. Selama proses pemberdayaan ini, anak dilihat perkembangannya. Jika ia sudah dianggap mandiri, maka ia dinyatakan lulus dan dipersilakan untuk melanjutkan kehidupannya yang baru. Dimana kriteria kemandirian anak jalanan dilihat dari apakah ia sudah memiliki rasa percaya diri dan percaya dengan kemampuan diri sendiri, serta ia sudah dapat kerja yang layak atau belum, dan sudah atau belum melanjutkan sekolah formalnya.

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Rumah Singgah Bina Anak Pertiwi dalam rangka pembentukan kemandirian anak jalanan. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan sehingga terbentuknya kemandirian anak jalanan seperti: : (a) Semangat kemanusiaan; (b) kemampuan dalam memecahkan masalah; (c) adanya kerjasama dan koordinasi; (d) kemampuan kreatif dan inovatif. Namun fakta dilapangan menunjukkan masih ada kendala dalam pelaksanaannya sehingga terkadang mengganggu kinerja pengurus seperti: (a) prasangka negatif dari masyarakat mengenai anak jalanan (b) rasa tidak percaya diri.

Berdasarkan temuan di lapangan dan analisa maka kedepannya proses pemberdayaan anak jalanan khususnya dalam hal pembentukan kemandirian perlu adanya sinergisitas seluruh elemen terkait dalam pelaksanaan

kegiatan dan pasca dari rumah singgah agar para anak jalanan ini mampu menyalurkan berbagai ketrampilan dan potensinya, baik melanjutkan sekolah formalnya maupun bekerja secara layak tanpa perlu menjadi anak jalanan lagi.

#### DAFTAR REFERENSI

- Adi, Isbandi R.. (2013). *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anita, Ade. (1996). *Upaya penanganan anak jalanan (studi literature mengenai penanganan anak jalanan di beberapa negara berkembang)*. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, UI. Skripsi tidak diterbitkan.
- Cresswell, John. (2010). *Research design – qualitative and quantitative approaches*. New Delhi
- Huraerah, Abu. 2007. *Child abuse (kekerasan terhadap anak)*. Bandung: Nuansa.
- Ivancevich, John M. dkk. (2006). *Perilaku dan manajemen organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Johnson, Louise C, and Charles L. Swartz. (1991). *Social Welfare: A Response to Human Needs*. Boston: Allyn & Bacon.
- Misran, dkk. (2011). *Situasi anak jalanan kota medan dan pengembangan program aksi*. Medan: Yayasan Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Owin, Jamasy. (2004). *Keadilan, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan*. Blantika Mizan.
- Papalia, Diane E. & Olds, Sally Wendkos. (1995). *Human Development*. New York: Mc Graw-Hill Inc.
- Safaria. (2005). *Interpersonal intelegence*. Jakarta: Amara Books.
- Siahaan, M. Rondang. (2003). *Kampanye Sosial Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Direktorat Kesejahteraan Anak Departemen Sosial RI*. Fakultas Ilmu Komunikasi, UI. Tesis tidak diterbitkan.
- Sjarkawi. (2008). *Pembentukan kepribadian anak*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Suharto, Edi. (2011). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2012). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suud, Mohammad. (2006). *3 orientasi kesejahteraan sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suyanto, Bagong. (2001). *Tindak kekerasan mengintai anak-anak*. Surabaya: Lutfansah Media Tama.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (2002). *Pembangunan dilema dan tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walgito, Bimo. (2004). *Pengantar psikologi umum*. Yogyakarta: Andi.

**Sumber Dokumen peraturan perundang – undangan :**

- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Sumber Jurnal :**

- Nachrowi, Nachrowi D. dan Salahudin A. Muhidin. 1997. Jurnal Prisma. *Pekerja anak dan industrialisasi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia. No. 2 Tahun XXIV Februari 1997.
- Runtiko, Agus Ganjar. 2009. Jurnal Penelitian Komunikasi. *Konstruksi identitas sosial kaum remaja marjinal (studi kasus di kalangan remaja pengamen jalanan di Purwokerto)*. Bandung: Depkominfo. Vol. 12 No.1.

**Sumber Surat Kabar :**

- Berdayakan Anak Jalanan dengan Pelatihan Ketrampilan*. Seputar Indonesia, 23 Mei 2012.

**Sumber Internet :**

*“7.300 Anak Jalanan di Jakarta Terlantar”*

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/03/26/mk9siu-7300-anak-jalanan-di-jakarta-terlantar>. Diakses 22 Juni 2020.

*“Potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi”*

<http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi/>. Diakses 22 Juni 2020.